

Pendidikan Inklusif di Indonesia: Tinjauan Konseptual terhadap Kebijakan, Implementasi, Tantangan, dan Strategi Penguatan Pendidikan yang Berkeadilan bagi Semua Peserta Didik

Putri Nur Fadhiyah*, Ainur Rofik

Universitas KH.Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi

*Penulis korespondensi: fadiyahputrinur@gmail.com

Dikirim : 12 Juli 2026

Direvisi : 13 Agustus 2026

Diterima : 14 Agustus 2026

Abstrak: Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan pendidikan yang memberikan hak kepada setiap peserta didik, termasuk didalamnya anak berkebutuhan khusus dalam rangka mendapatkan layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. Tujuan artikel ini yakni mengkaji kebijakan, implementasi, tantangan, dan manfaat pendidikan inklusif yang ada di Indonesia dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, pengelompokan, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendidikan inklusif yang ada di Indonesia telah mendapatkan landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kompetensi guru serta sarana prasarana yang kurang memadai. Di satu sisi, penerapan pendidikan inklusif memberikan berbagai ragam manfaat diantaranya meningkatkan akses pendidikan dan pengembangan sikap toleransi dalam keberagaman. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusif membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: anak berkebutuhan khusus, implementasi, kebijakan pendidikan, pendidikan berkeadilan, pendidikan inklusif

Abstract: Inclusive education is an educational approach that recognizes the right of every learner, including children with special educational needs, to receive equitable educational services without discrimination. This article aims to examine the policies, implementation, challenges, and benefits of inclusive education in Indonesia in order to promote equitable education. This study employed a library research method. The collected data were analyzed descriptively and qualitatively through data reduction, categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that inclusive education in Indonesia has a strong legal foundation through the National Education System Law and Minister of National Education Regulation No. 70 of 2009. Nevertheless, its implementation continues to face challenges, including limited teacher competence and inadequate educational facilities and infrastructure. On the other hand, the implementation of inclusive education provides various benefits, including improving access to education and fostering tolerance toward diversity. Therefore, the success of inclusive education requires a shared commitment among the government, schools, educators, parents, and the community to establish an inclusive, equitable, and sustainable education system.

Keywords: children with special needs, education policy, equitable education, implementation, inclusive education

1. Pendahuluan

Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan yang sama dengan anak-anak pada umumnya (Budianto, 2023). Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif mulai diperkenalkan melalui kebijakan yang mendukung akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan berbagai peraturan pemerintah lainnya (Andriani dkk., 2024). Hal ini didorong oleh pemahaman bahwa pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi sosial dan pemahaman terhadap keragaman, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil (Kuntari dkk., 2024).

Meskipun demikian, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang terlatih khusus dalam menangani keberagaman kebutuhan di dalam kelas. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang strategi pengajaran inklusif di kalangan guru dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus (Faujiyyah dkk., 2025). Selain itu, aksesibilitas fisik di banyak sekolah, seperti fasilitas untuk anak dengan disabilitas fisik, masih terbatas (Gustaman dkk., 2025).

Namun demikian, upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan inklusif terus dilakukan dengan memperkuat kebijakan, mengembangkan kurikulum yang inklusif, serta melibatkan masyarakat dalam mendukung tercapainya pendidikan untuk semua. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, diharapkan pendidikan inklusif dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya mendukung perkembangan akademik anak, tetapi juga membentuk karakter yang saling menghargai perbedaan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) (Prayudi dkk., 2023). Metode ini bertujuan dalam mengkaji secara mendalam konsep pendidikan inklusif melalui berbagai sumber ilmiah yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep, kebijakan, implementasi, tantangan, dan manfaat pendidikan inklusif di Indonesia

berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran para ahli.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi lembaga nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia (Haifa dkk., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional maupun internasional. Selanjutnya, setiap sumber diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, kemudian dilakukan pencatatan, pengelompokan informasi, serta telaah kritis terhadap konsep dan temuan yang disajikan dalam setiap referensi.

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, pengelompokan data berdasarkan tema pembahasan, interpretasi terhadap hasil kajian dari berbagai sumber, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Analisis ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai kebijakan, implementasi, tantangan, dan manfaat pendidikan inklusif di Indonesia serta memberikan rekomendasi konseptual bagi penguatan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

Pendidikan inklusif, sebagai pendekatan fundamental dalam dunia pendidikan, menekankan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dalam lingkungan pembelajaran yang sama. Sasmin & Yusuf (2023) membahas esensi penciptaan kelas inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan semua peserta didik. Konsep dasar pendidikan inklusif yang dikemukakan oleh Salend mencakup penerimaan terhadap perbedaan, keadilan dalam memberikan akses dan peluang, serta partisipasi aktif dari semua peserta didik.

UNESCO (2009) menyoroti peran penting kebijakan inklusif dalam membentuk lingkungan pendidikan yang mendukung keberagaman. UNESCO menegaskan perlunya

menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan menciptakan ruang yang mana setiap individu, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat belajar secara efektif.

Natalie & Purwanti (2026) menyumbangkan wawasan tambahan terkait konsep dasar pendidikan inklusif. Menurutnya, konsep ini terdiri dari tiga elemen utama: penerimaan terhadap perbedaan, keadilan dalam memberikan akses dan peluang, serta partisipasi aktif dari semua peserta didik. Melalui pemahaman dan implementasi konsep dasar ini, pendidikan inklusif menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, merangkul keberagaman, dan memberikan hak kepada setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensinya.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa konsep dasar pendidikan inklusif bukan hanya sekadar retorika, melainkan fondasi yang kokoh untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, merangkul keberagaman, dan memberikan hak kepada setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensinya.

3.1 Esensi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Sejarah awal pendidikan khusus di Indonesia dikenal dengan terselenggaranya 3 jenis sekolah yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Terpadu. SLB adalah sekolah yang menyediakan layanan pendidikan hanya untuk satu kategori anak berkebutuhan khusus. Selain itu di SLB juga terdapat berbagai jenjang pendidikan dimulai dari jenjang TK sampai dengan SMA. Berbeda dengan SDLB yang hanya terdapat satu jenjang saja yaitu SD (Sekolah Dasar). Namun SDLB menyediakan layanan pendidikan pada semua kategori anak berkebutuhan khusus. Sedangkan sekolah terpadu adalah sekolah reguler yang menampung anak berkebutuhan khusus yang diberikan sarana dan prasarana yang sama termasuk kurikulum pembelajarannya (Syukri & Said, 2024).

Program pendidikan terpadu pada tahun 1980-an merupakan bibit dari penerapan pendidikan inklusif di Indonesia (Wiranto dkk., 2024). Namun, kurang tepatnya proses penerapan program tersebut menjadikan pendidikan terpadu kurang diterima oleh kalangan masyarakat, sehingga seiring dengan berjalannya waktu program pendidikan terpadu mulai menghilang. Setelah munculnya “The Salamanca Statement on Inclusive Education” dari hasil deklarasi Salamanca di Spanyol pada tahun 1994, hampir setiap negara di dunia mulai menerapkan sistem pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif itu sendiri berasal dari istilah Inklusi. Menurut KBBI, kata inklusi memiliki arti sebuah ideologi untuk membentuk suatu lingkungan yang terbuka, dengan

mengikutsertakan setiap orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, karakteristik, kondisi tertentu, suku, ras, dan agama. Tentu kita dapat menggambarkan bahwasanya pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang mengikutsertakan semua peserta didik tanpa memandang status apapun, termasuk karakteristik dan kondisi tertentu. Sehingga demikian setiap anak dapat belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah dengan layanan yang sama untuk menumbuhkan lingkungan sekolah yang bersifat inklusif. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendidikan terintegrasi di mana anak berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi untuk memperoleh layanan pendidikan dengan sistem, metodologi, dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Putri dkk., 2025).

3.2 Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan untuk mendorong implementasi pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua peserta didik. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi landasan utama bagi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya. UU Sisdiknas menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif diartikan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang memastikan akses, partisipasi, dan keberhasilan belajar bagi semua peserta didik, tanpa membedakan latar belakang atau kondisi fisik, mental, sosial, dan emosional mereka (Beridanissa, 2025).

Kebijakan kurikulum juga menjadi fokus dalam implementasi pendidikan inklusif. Kurikulum Nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencakup panduan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengikuti proses pembelajaran dengan optimal. Program pendukung lainnya yang telah diterapkan mencakup pemberian dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program, seperti program bimbingan dan konseling, pendampingan, serta penyediaan fasilitas dan sumber daya pendidikan yang inklusif.

Salah satu kebijakan penting adalah pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai satuan pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus. SLB memiliki kurikulum dan program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik, serta tenaga pendidik yang terlatih untuk mendukung perkembangan mereka. Selain SLB,

pemerintah juga mendorong penyediaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler. Dalam kerangka ini, guru-guru dilatih untuk menerapkan pendekatan pembelajaran inklusif yang memperhatikan kebutuhan dan keberagaman peserta didik di dalam kelas.

Adanya kebijakan penerimaan peserta didik dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah reguler juga menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki akses yang sama ke pendidikan di sekolah-sekolah terdekat. Dalam upaya mendorong pendidikan inklusif, pemerintah juga melakukan upaya peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan tambahan. Guru-guru diberikan pemahaman dan keterampilan untuk menerapkan pendekatan diferensiasi dan strategi pembelajaran yang inklusif dalam menghadapi keberagaman peserta didik di kelas.

Kebijakan pendidikan inklusif juga mencakup upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusi dalam pendidikan. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini melibatkan pemantauan, penilaian, dan tindakan perbaikan yang kontinu guna memastikan bahwa pendidikan inklusif dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua peserta didik.

3.3 Pendidikan Inklusif dan Falsafah Bangsa Indonesia

Pendidikan inklusif adalah hak asasi, dan ini merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Secara sederhana ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan, antara lain: (a) Semua anak memiliki hak untuk belajar secara bersama-sama, (b) Keberadaan anak-anak jangan didiskriminasikan, dipisahkan, dikucilkan karena kekurangmampuan atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran, (c) Tidak ada satupun ketentuan untuk mengucilkan anak dalam pendidikan. Pendidikan inklusif merujuk pada pendidikan untuk semua yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali. Perubahan pendidikan melalui pendidikan inklusif memiliki arti penting khususnya dalam kerangka pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Secara teoritis pendidikan inklusif adalah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik

lainnya. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika (Putra, 2024). Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dsb. Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dsb. Adanya berbagai keberagaman namun dengan kesamaan misi yang diemban, sehingga menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan.

Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan keberbakatan hanyalah satu bentuk kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak hanya makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara yuridis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) diatur pada: Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) 1945 terdapat pasal – pasal mengenai hak asasi manusia yang salah satunya adalah hak dalam mendapatkan pendidikan bagi setiap orang yaitu pada pasal 28C ayat (1), Undang – Undang (UU) RI No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PERMENDIKNAS nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Selanjutnya pelaksanaan pendidikan inklusif diatur dalam PERDA masing-masing daerah di Indonesia.

3.4 Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia

Setiap sekolah di Indonesia memiliki model adaptasi kurikulum yang berbeda-beda untuk menerapkan pendidikan inklusi. Untuk mencapai pendidikan inklusif, kebijakan kurikulum juga menjadi perhatian utama (Munajah et al., 2021). Kurikulum Nasional dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk

memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat menikmati pembelajaran dengan cara terbaik. Untuk membantu siswa berkebutuhan khusus, program pendukung lainnya telah digunakan. Pemerintah telah meluncurkan program seperti bimbingan dan konseling, pendampingan, dan penyediaan sumber daya dan lingkungan pendidikan yang inklusif (Hidayat dkk., 2025).

Beberapa faktor, termasuk budaya, politik, dan sumber daya manusia, mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusi. Sampai saat ini, ada beberapa bidang yang perlu diperbaiki untuk sekolah inklusi. Sekolah inklusi tidak dilaksanakan sesederhana untuk menerapkan di sekolah umum, karena menerapkan pembelajaran inklusi membutuhkan fleksibilitas kurikulum, tenaga pendidik profesional yang dikenal sebagai guru pembimbing khusus, lingkungan dan penyelenggara sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, dan evaluasi pembelajaran. Sekolah yang menerapkan pembelajaran inklusi harus memiliki sarana dan prasarana yang cukup dan memadai untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan siswa ditingkatkan.

3.5 Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusif adalah kurangnya sumber daya yang memadai. Hal ini meliputi ketersediaan ruang kelas yang memadai, fasilitas pendukung seperti alat bantu belajar, dan sumber daya manusia yang terlatih untuk mendukung kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Stigma sosial terhadap peserta didik berkebutuhan khusus menjadi hambatan serius dalam pendidikan inklusif. Terkadang, masyarakat masih kurang memahami kondisi dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga terjadi penolakan dan diskriminasi yang menghambat akses mereka ke pendidikan yang inklusif.

Kurangnya pelatihan bagi guru menjadi kendala dalam menerapkan pendidikan inklusif. Guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menghadapi keberagaman peserta didik di kelas, termasuk pemahaman tentang kebutuhan khusus, penggunaan strategi pembelajaran inklusif, dan pengelolaan kelas yang inklusif. Kurangnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat juga menjadi hambatan dalam pendidikan inklusif. Ketika masyarakat tidak mendukung atau tidak memahami pentingnya inklusi dalam pendidikan, hal ini dapat menghambat terciptanya lingkungan yang inklusif di sekolah maupun masyarakat luas.

Tantangan lainnya adalah kurangnya aksesibilitas fisik di sekolah-sekolah. Beberapa sekolah masih belum ramah bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, seperti aksesibilitas bagi peserta didik dengan disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda atau alat bantu mobilitas. Terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang terlatih dalam pendidikan inklusif juga menjadi tantangan. Diperlukan tenaga pendidik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mendukung keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran.

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait dalam mendukung pendidikan inklusif. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus. Permasalahan ekonomi juga menjadi hambatan dalam pendidikan inklusif. Biaya yang tinggi terkait dengan pemberian dukungan dan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sering kali menjadi kendala bagi keluarga maupun sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang berkualitas.

Dukungan teknologi yang kurang memadai juga menjadi tantangan dalam menerapkan pendidikan inklusif. Penggunaan teknologi pendidikan, seperti alat bantu belajar atau perangkat lunak yang inklusif, dapat membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengakses pembelajaran, namun ketersediaannya masih terbatas di beberapa daerah. Terakhir, kurangnya penelitian dan data yang memadai mengenai pendidikan inklusif di Indonesia menjadi hambatan dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang efektif. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan pengumpulan data yang komprehensif untuk memahami tantangan dan keberhasilan dalam implementasi pendidikan inklusif.

Tantangan dan hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia memerlukan kerjasama dan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pendidikan inklusif dapat terwujud secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

3.6 Dampak dan Manfaat Pendidikan Inklusif

Dampak dan manfaat pendidikan inklusif sangat penting untuk dipahami. Peningkatan partisipasi adalah salah satu dampak positif yang dihasilkan oleh pendidikan inklusif. Melalui pendekatan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan berpartisipasi dalam aktivitas belajar di lingkungan sekolah yang

umum. Hal ini membantu meningkatkan tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta didik secara menyeluruh. Dalam pendidikan inklusif, terjadi perkembangan sosial-emosional yang positif. Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan bergaul dengan teman sebaya yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Ini membantu dalam pengembangan keterampilan sosial, empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Penghargaan terhadap keragaman adalah dampak penting dari pendidikan inklusif. Peserta didik tanpa kebutuhan khusus diajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan individual dalam konteks belajar. Mereka belajar untuk menerima dan menghormati keragaman dalam hal kemampuan, latar belakang budaya, dan keberagaman lainnya. Dampak positif lainnya adalah peningkatan pengembangan akademik. Melalui pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Mereka menerima dukungan dan modifikasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka, sehingga meningkatkan hasil akademik mereka.

Peserta didik tanpa kebutuhan khusus juga mengalami manfaat dari pendidikan inklusif. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang inklusif dan terpapar dengan keragaman peserta didik. Hal ini membantu mereka membangun pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan individu, mengembangkan empati, dan memperluas wawasan mereka tentang dunia yang beragam. Pendidikan inklusif juga berdampak positif pada kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik tanpa kebutuhan khusus sama-sama terlibat dalam pembelajaran yang melibatkan pemecahan masalah nyata. Mereka belajar untuk berpikir kritis, mengatasi tantangan, dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif.

Dalam pendidikan inklusif, terjadi peningkatan pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan belajar keterampilan komunikasi yang efektif. Ini membantu mereka dalam berkomunikasi dengan lebih baik dan membangun hubungan sosial yang positif. Dampak positif lainnya adalah peningkatan rasa percaya diri dan harga diri. Melalui pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus menerima dukungan dan pengakuan atas kemampuan dan prestasi mereka. Ini membantu mereka dalam membangun rasa percaya diri dan harga diri yang positif.

Pendidikan inklusif juga berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperkenalkan peserta didik tanpa kebutuhan khusus dengan keragaman dan inklusi sejak

dini, masyarakat menjadi lebih terbuka dan menerima perbedaan. Hal ini membantu dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dampak positif terakhir adalah peningkatan kesempatan kerja dan inklusi dalam kehidupan yang mandiri. Melalui pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik berkebutuhan khusus, mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk memperoleh keterampilan dan pendidikan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup secara mandiri.

Dengan adanya dampak dan manfaat ini, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk terus mendorong dan mendukung implementasi pendidikan inklusif guna menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan bermanfaat bagi semua peserta didik.

4. Kesimpulan

Pendidikan inklusif merupakan suatu langkah penting dalam memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, mendapatkan hak yang setara dalam memperoleh pendidikan berkualitas di lingkungan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Meskipun implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan untuk pendidik, dan stigma sosial terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, berbagai kebijakan dan upaya terus dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan inklusif. Dengan kebijakan yang mendukung, kurikulum yang adaptif, serta partisipasi aktif dari masyarakat, pendidikan inklusif diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, menghargai perbedaan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensinya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penulis, peneliti, dan institusi yang telah menghasilkan berbagai referensi ilmiah sehingga menjadi sumber kajian dalam penulisan artikel ini. Penelitian ini tidak memperoleh pendanaan dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya.

Daftar Referensi

- Andriani, O., Pangestu, P. E., Noviyanti, D. F., & Julianti, S. (2024). Landasan Filosofis Dalam Optimalisasi Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 185–201. <https://doi.org/10.54832/jupe2.v2i1.270>
- Beridanissa, D.A. (2025). Strategi Guru dalam Menerapkan Pendidikan Inklusif Berbasis Sekolah Ramah Anak. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 8(1). <https://doi.org/10.31004/aulad.v8i3.1365>
- Budianto, A.A. (2023). Pentingnya Pendidikan Inklusif: Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Ramah Bagi Semua Siswa. *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Psikologi*, 1(1), 12–19. <https://doi.org/10.61397/jkpp.v1i1.10>
- Faujiyyah, H.J., Sahara, A., & Rachman, I.F. (2025). Studi Tentang Persepsi Guru Terhadap Pendidikan Inklusi di Indonesia : Hambatan dan Peluang. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(5), 48–60. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i3.1717>
- Gustaman, R.F., Gandi, A., & Ratnaningsih, N. (2025). Implementasi pendidikan inklusif dalam mewujudkan sekolah ramah anak. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 660–666. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i1.6635>
- Haifa, N.M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika Pembelajaran : Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 256–270. <https://doi.org/10.62383/dilan.v2i2.1563>
- Hidayat, A. D. W., Akbar, M. A., Azib, M., Zakiyah, H. Q., Ramadhani, R. S., & Asitah, N. (2025). Kompetensi Guru dalam Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar : Kajian Literatur Sistematis. *Nusantara Educational Review*, 3(1), 69–77. <https://doi.org/10.55732/ner.v3i1.1597>
- Kuntari, D., Raihan, M., Lutfiah, T., & Khasanah, U. (2024). Implementasi Program Pendidikan Inklusi di Sekolah Alam Banyu Belik Kedung Banteng. *Jurnal Pendidikan Guru MI*, 7(1).
- Natalie, M., & Purwanti, M. (2026). Hubungan Antara Kompetensi dan Sikap Guru Tentang Pendidikan Inklusi di Sekolah Inklusi Daerah Tangerang Selatan. *Provita Jurnal Psikologi Pendidikan*, 19(1), 28–42. <https://doi.org/10.24912/provita.v19i1.36958>
- Prayudi, A., Fathirma'ruf, Supriyaddin, Arifin, & Jama'ah. (2023). Studi Literatur : Penggunaan Model Analogi dalam Proses Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 4(1), 22–28. <https://doi.org/10.54371/ainj.v4i1.203>
- Putra, N.Y. (2024). Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah Fondasi Integrasi Bangsa Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Moderasi Beragama*, 1(1), 99–106.
- Putri, H.A., Putri, W.P., & Setyo, B. (2025). Pendidikan Inklusi yang Berkeadilan : Studi Kasus

- Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 762–773. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1144>
- Sasmin, S. & Yusuf, O.Y.H. (2023). Engaging Classrooms: Authentic, Inclusive Engagement. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan (AJPP)*, 2(2), 165–177. <https://doi.org/10.57250/ajpp.v2i2.215>
- Syukri, M., & Said, S. (2024). Studi Kasus Sekolah-Sekolah Bertaraf (Branding): Terpadu , Program Khusus. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 6361–6371. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7791>
- Wiranto, W., Puling, H., Lase, S., & Topayung, S.L. (2024). Implementasi Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk. *Damai: Jurnal Pendidikan Agama Kristen Dan Filsafat*, 1(4), 60–69. <https://doi.org/10.61132/damai.v1i4.192>